



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Nomor : B-874/D.PHP.2/PP.04.02/05/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan

28 April 2023

Yth. Bapak/Ibu  
(daftar terlampir)  
di –  
Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan Penyusunan Rancangan Permen PPPA tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat, pada 14 April 2023 di Hotel Savero Style Bogor, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan akan menyelenggarakan Rapat Lanjutan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada:

hari/tanggal : Kamis, 4 Mei 2023  
waktu : pukul 09.00 WIB - selesai  
tempat : Ruang Rapat Lt. 6 Kemen PPPA

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Saudara untuk memberikan masukan pada rapat dimaksud. Konfirmasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdri. Mutia No. HP. 08119990501 dan Sdri. Annisa No. HP. 0856-1157-796.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Plh. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Dyah Elvina

Tembusan Yth.  
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN UNDANGAN

Nomor : B- 874/D.PHP.2/PP.04.02/05/2023

Tanggal : 28 April 2023

**DAFTAR UNDANGAN**

**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan;
2. Asisten Deputi Bidang Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas;
4. Analis Kebijakan pada Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan.
5. Analis Perencana pada Asdep Pekerja dan Tindak Perdagangan;
6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;

**Konsultan**

7. Anna Sakreti;
8. Evandri Pantouw.

Plh. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Dyah Elvina